

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan gerakan dusun membangun (GDM) di Dusun Tirta Mulya, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi tahun 2018, ditemukan bahwa penerapan ketiga prinsip *good governance* yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi belum diterapkan dengan sangat baik. Hal ini terbukti dengan penggunaan indikator transparansi, akuntabilitas dan partisipasi yang peneliti gunakan untuk mengukur pelaksanaan ketiga prinsip tersebut di Dusun Tirta Mulya. berdasarkan ketiga indikator prinsip tersebut, hanya satu prinsip yang pelaksanaannya terpenuhi yakni prinsip transparansi. Sedangkan prinsip akuntabilitas dan partisipasi belum terpenuhi serta terlaksana dengan baik. Hal ini berbeda dengan dugaan awal peneliti bahwasannya ketiga prinsip yakni transparansi, akuntabilitas dan partisipasi telah berjalan dengan sangat baik di Dusun Tirta Mulya, mengingat kemenangan dusun tersebut dalam *award* dengan kategori pengelola GDM terbaik pada tahun 2018. Sebaliknya peneliti menemukan bahwasannya kemenangan Dusun Tirta Mulya di tahun 2018 sebagai dusun terbaik dalam pengelolaan dana GDM lebih disebabkan karena faktor ketepatan serta kelengkapan dokumen, perencanaan program, dan laporan pelaksanaan. Jadi penentuan kemenangan di tahun 2018 lebih berdasarkan

kelengkapan administrasi saja, hal ini disebabkan pada tahun 2018 merupakan *award* pertama untuk kategori dusun pengelolaan GDM terbaik.

Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan peraturan bupati yang menjadi dasar pelaksanaan GDM di Kabupaten Bungo. Ketiga prinsip seperti transparansi, akuntabilitas serta partisipasi merupakan titik penting pelaksanaan pengelolaan GDM, sehingga dalam evaluasi pelaksanaannya penerapan ketiga prinsip ini yang harus menjadi penilaian utamanya. Peneliti juga menemukan bahwasannya ketiga prinsip tersebut masih diartikan secara sederhana oleh pemerintah dusun sebagai pelaksana, sehingga pelaksanaannya masih belum optimal. Namun terdapat hal yang membuat Dusun Tirta Mulya berbeda ialah SDM aparatur dusunnya tidak malu serta tidak lelah untuk selalu belajar dan memperbaiki apa yang kurang dalam setiap program yang dijalankan. Hal itu disampaikan oleh Sapruji Dwi Apriyanto selaku Wakil Bupati Kabupaten Bungo.

Selain itu, peneliti juga menemukan dibalik berjalannya ketiga asas ini terdapat faktor pendorong yang menyebabkan asas transparansi, akuntabilitas dan partisipasi terpenuhi tanpa harus direkayasa. Faktornya ialah gotong royong, budaya Jawa yang masih mendominasi serta dalam pengambilan sebuah keputusan selalu mengedepankan musyawarah mufakat bersama dengan masyarakat serta elemen penting seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, dan perangkat dusun lainnya. Meskipun tiga prinsip ini bukan merupakan penentu kemenangan Dusun Tirta Mulya, namun secara tidak langsung ketiga prinsip ini telah terlaksana walaupun belum optimal, dan terlaksananya ketiga prinsip ini didorong oleh faktor yang disebutkan sebelumnya.

Selain faktor pendorong, terdapat juga faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan prinsip *good governance* di Dusun Tirta Mulya. Faktor ini yang kemudian peneliti jadikan sebagai temuan baru dalam penelitian. Temuan baru tersebut ialah berupa adanya faktor yang melatarbelakangi pelaksanaan prinsip *good governance* di Dusun Tirta Mulya seperti kualitas SDM, koordinasi kerja dalam perangkat dusun, serta adanya budaya kerja yang dilakukan oleh perangkat dusun Tirta Mulya.

6.2 Saran

Berdasarkan beberapa temuan yang peneliti temukan di lapangan dan telah dirangkum dalam kesimpulan penelitian terkait pelaksanaan prinsip *good governance* dalam pengelolaan GDM di Dusun Tirta Mulya terdapat sedikit banyaknya saran dari peneliti baik secara teoritik dan praktis sebagai berikut:

1. Rekomendasi kepada pemerintah kabupaten Bungo

Dalam hal ini pemerintah kabupaten sebaiknya agar lebih memberikan ruang bagi pemerintah dusun dalam menentukan program serta kegiatan apa yang diperlukan bagi dusun mereka, sehingga tidak memukul rata atau menyamaratakan program kepada seluruh dusun. Karena kebutuhan setiap dusun berbeda-beda sehingga terdapat program yang kesannya dipaksakan. Selain itu, pemerintah kabupaten Bungo kedepannya lebih memperhatikan pembiayaan perihal pemberdayaan masyarakat. Sebab sejak awal diterapkannya program GDM ini, dana yang di gelontorkan hanya digunakan untuk yang bersifat fisik saja.

2. Rekomendasi kepada pemerintah dusun Tirta Mulya

Pemerintah dusun, khususnya dusun tirta mulya kedepannya diharapkan dapat lebih meningkatkan profesional dan pemahaman terkait pelaksanaan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Serta lebih memahami mengenai dasar-dasar hukum yang melandasi setiap program ataupun kegiatan. Selain itu, kesenian lokal seperti reog, jatilan, marawis dan lain sebagainya semestinya lebih diperdayakan sehingga hal tersebut dapat lebih meningkatkan kearifan lokal masyarakat dusun Tirta Mulya.

3. Rekomendasi kepada masyarakat dusun Tirta Mulya

Masyarakat dusun yang dalam hal ini ialah masyarakat dusun Tirta Mulya semestinya menggunakan kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah dusun dengan sebaik-baiknya. Seperti kesempatan bersuara, terdapat temuan bahwasannya masyarakat dusun hanya sekedar legalitas diatas kertas saja, kedepannya diharapkan masyarakat lebih ikut andil bukan hanya sebagai legalitas diatas kertas, melainkan ikut serta dan berani mengemukakan pendapatnya kepada pemerintah dusun Tirta Mulya.

